



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PALABUHAN RATU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas karunia – Nya Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi PPN Palabuhanratu kepada publik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

LKj PPN Palabuhanratu ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 yang dilaporkan secara bertahap. LKj PPN Palabuhanratu triwulan I tahun 2024 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja tahun 2024.

Menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan, untuk itu kritik dan saran dalam upaya penyempurnaan sangat kami harapkan agar laporan ini bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang telah membantu dan turut serta dalam penyelesaian laporan ini semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua, Aamiin.

Palabuhanratu, 15 April 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan

Nusantara Palabuhanratu

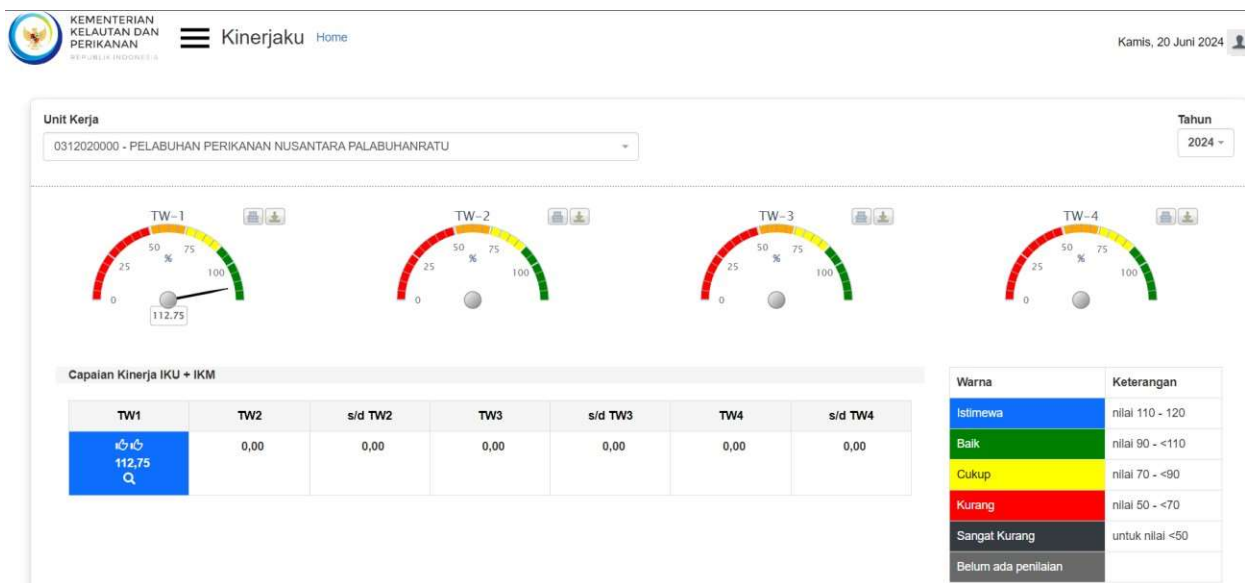


Yusuf Fathahah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.16.722.319.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 8.213.341.757,- atau 50,38%. Secara kinerja, PPN Palabuhanratu mendapat Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,75, sebagaimana terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Dashboard Aplikasi Kinerjaku PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	1
1.3 Kedudukan	2
1.4 Tugas dan Fungsi	3
1.5 Aspek Strategis	5
1.6 Sistematik Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis PPN Palabuhanratu 2021 – 2024	8
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.3 Target Kinerja dan Anggaran	11
2.4 Rencana Aksi Penetapan Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	15
SS 1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu	17
SS 2 Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat.....	19
SS 3 Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing yang Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu	21
SS 4 Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal.....	22
SS 5 Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu.....	26
SS 6 Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPN Palabuhanratu.....	27
SS 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu	33
3.2 Akuntabilitas Keuangan	51
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	59
LAMPIRAN DATA DUKUNG KINERJA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator dan Target Kinerja PPN Palabuhanratu Tahun 2024	11
Tabel 2	Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024	12
Tabel 3	Rencana Aksi Indikator Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 4	Nilai Pencapaian IKU PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2024	16
Tabel 5	Capaian IKU "Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2024	18
Tabel 6	Capaian IKU "Tingkat operasional PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2024	21
Tabel 7	Capaian IKU "Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan" Triwulan I Tahun 2024	23
Tabel 8	Capaian IKU " Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2024	25
Tabel 9	Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran pada DIPA PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2024.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	5
Gambar 2	Dashboard Aplikasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Triwulan I Tahun Anggaran 2024	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPN Palabuhanratu) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) yang telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Lima kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan; (2) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; (3) Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan; (4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan (5) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggung jawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

1.2 GAMBARAN UMUM

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu merupakan kawasan terpilih sebagai basis atau sentra pengelolaan perikanan untuk pengembangan ekonomi usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, pelaku usaha dan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi wilayah, penciptaan lapangan kerja dan

pendapatan masyarakat, melalui penataan pusat pelayanan bisnis perikanan yang berfungsi melayani, mendorong, dan memacu pembangunan kawasan perikanan di wilayah Jawa Barat.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berada di Teluk Palabuhanratu yang merupakan bagian dari perairan Samudera Hindia (WPP-RI 573). Dilatarbelakangi adanya potensi perikanan di sekitar Palabuhanratu, maka dibangunlah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu pada tahun 1991 – 1993 dengan dana pembangunan pada tahap awal bersumber dari *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (IDB) dan pada tanggal 18 Februari 1993 diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI.

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan nasional, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan) dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan) sebagai *mainstream* dari pembangunan kelautan dan perikanan mengingat wilayah laut/pantai dimana kegiatan perikanan berada merupakan sumberdaya anugrah potensial (*potential endowed resources*) yang khas memiliki keterkaitan (*intervedency*) yang kompleks dengan bidang sosial-perekonomian-budaya masyarakat disekitarnya. Kesiapan komponen infrastruktur/ fasilitas/ sarana penangkapan akan sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan eksploitasi sumberdaya tersebut.

1.3 KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum pengelolaan Pelabuhan perikanan antara lain:

- Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Tahun 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

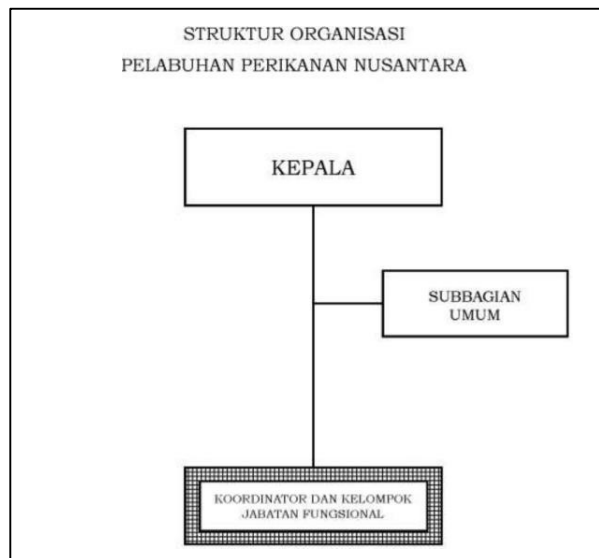
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang Pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan dan pemasaran serta distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap terdiri dari:

- a. Subbagian Umum. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.5 ASPEK STRATEGIS

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan renstra DJPT adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- b. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di Pelabuhan perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- c. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang kompeten, professional, dan berintegritas;

- d. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; dan
- e. Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu secara efisien dan akuntabel.

1.6 SISTEMATIK PENYAJIAN

Penyusunan LKj 2023 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang transparan dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang LKj yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini menguraikan secara singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/ Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Renja) dan Penetapan Kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menguraikan pembahasan IKU sesuai dengan *Balanced Score Card* (BSC). Memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis

akuntabilitas kinerja, yang diuraikan secara sistematis serta membandingkan data kinerja, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan juga akuntabilitas keuangan yang menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/ tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategis pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU 2021 – 2024

Sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan serta perikanan yang berkelanjutan an Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni mewujudkan Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera yang tertuang dalam Renstra DJPT Tahun 2020 – 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Adapun visi misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, yaitu:

VISI

Dengan mempertimbangkan dan merupakan penjabaran visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahu 2020 – 2024 adalah **“Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Perikanan Terpadu”**

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang diemban Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah:

- a. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;

- d. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
- e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/ Lembaga lain yang beraktifitas di dalam Pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/ harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah **“Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja: Penerimaan PNBP Non SDA di PPN palabuhanratu;
2. Sasaran kegiatan kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah **“Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat”**, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu;
3. Sasaran kegiatan ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing”**, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu;
4. Sasaran kegiatan keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah **“Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal”**, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai pengendalian lingkungan di PPN Palabuhanratu.
5. Sasaran kegiatan kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan Kapal**

Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu”, dengan indikator kinerja: Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan;

6. Sasaran kegiatan ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu;
 - b. Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu;
 - c. Nilai IKPA PPN Palabuhanratu;
 - d. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Palabuhanratu

2.3 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap secara terukur, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah menetapkan target – target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merujuk pada IKU Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Target –

target tersebut tertuang pada Perjanjian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024 sebagai dengan tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu	1	Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu (Rp. juta)	1.188,54
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	5.800
3	Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu (%)	100
		4	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu (%)	32
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu (%)	55
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	90
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Palabuhanratu	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (%)	7
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu	10	Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	80
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu (%)	80
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu (Indeks)	84
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu (%)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu (%)	80
		16	Nilai IKPA PPN Palabuhanratu (Nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu (Nilai)	86
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Indeks)	88,3

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.16.722.319.000.

Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN(Rp.)
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.109.853.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	40.208.000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.530.258.000
JUMLAH		16.722.319.000

2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target — target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulan) terhadap pencapaian indikator *output* dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya — upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi penetapan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
1	Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu	Sosialisasi Dan Monev Pengguna Jasa Di Pelabuhan Perikanan
		Sarana Pendukung Pemungutan PNBP Pasca Produksi
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu	Penyediaan Petugas Pendataan Produksi Ikan di Pelabuhan Perikanan
		Monitoring dan Evaluasi Hasil Tangkapan Ikan (Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Terkait Pendataan & Baju Petugas Pendataan)
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
		Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu (%)	Pelayanan Perusahaan Pelabuhan Perikanan
4	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu	Sarana Penunjang Perusahaan Pelabuhan
		Bimtek Dan Pembinaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Di Pelabuhan
		Operasional Inspeksi Pengendalian Mutu Di Pelabuhan Perikanan
		Honor Tim Pengendali Teknis
		Pelaksanaan tata kelola dan operasional SPDN di pelabuhan perikanan
		Pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan
		Publikasi Dan Promosi Pelabuhan Perikanan
		Pelaksanaan Penerbitan SPP PNBP Pasca Produksi
		Pelaksanaan Pengamanan Terpadu PNBP Pascaproduksi
		Bimtek PIPP Ke Pelabuhan Binaan
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu (%)	Tata Kelola Dan Operasional Kesyahbandaran
		Operasional Kesyahbandaran Di Pelabuhan Binaan Ujung Genteng
		Operasional Kesyahbandaran Di Pelabuhan Binaan Cisolok
		Desimilasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB Di Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi
		Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi

Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
		Pengelolaan Dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Di Pelabuhan Perikanan
		Desiminasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Dan Penerapan Lembar Awal Di Pelabuhan Perikanan
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu (%)	Fasilitas Pendukung PNBP Pasca Produksi
		Pengadaan Fender Dermaga
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	Operasional K5 Di Pelabuhan
		Surveillance ISO 14001:2015
		Gerakan Bersih Pelabuhan
		Bulan Cinta Laut
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan/ pengukuran/ pengujian/ inspeksi kapal perikanan
9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (%)	Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)
		Sosialisasi dan Asistensi Pelayanan Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan dan E-PKL (Pelaksanaan Dalam Kantor/Balai Nelayan/Pemerintah)
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan	Forum Konsultasi Publik Dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas
		Penguatan RB Lingkup PPN Palabuhanratu
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu	
12	Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap
		Pengelolaan Kinerja Lingkup PPN Palabuhanratu
13	IP ASN PPN Palabuhanratu	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Dan Penerapan Disiplin Pegawai
14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu	
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu	
16	Nilai IKPA PPN Palabuhanratu	Pembayaran gaji dan tunjangan
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		Langganan Daya dan Jasa
		Pemeliharaan Kantor
		Pelayanan Terkait Operasional Satker
		Langganan Jasa Lainnya

Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
		Pengadaan Sarana Perkantoran
17	Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu	Implementasi PIPK dan SPIP Lingkup PPN Palabuhanratu
		Penyusunan Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu	Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan Publik Di Pelabuhan
		Pelaksanaa Penataan Dokumen Pelayanan Pelabuhan Perikanan
		Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan

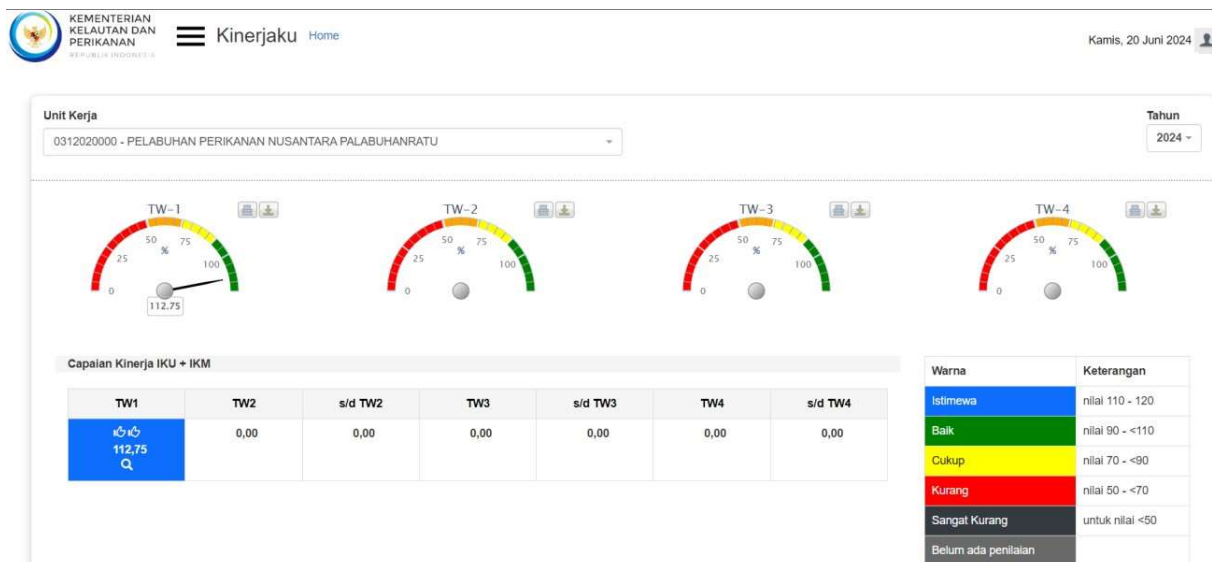
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada Triwulan I Tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) mendukung pembangunan perikanan melalui 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Metode pengukuran kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id Hasil pengukuran kinerja kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan *dashboard* capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2024 seperti pada gambar 2.

Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2024



Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu memperoleh rata – rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I Tahun 2024 sebesar 112,75% dan termasuk dalam kategori “**Istimewa**” (≥ 110). Adapun rincian pencapaian

indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			Tahun 2024	TW 1 2024	TW 1 2024	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Palabuhanratu	1 Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta)	1.188,54	297,13	486,13	163,61
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	5.800	1.000	3.570,82	357,08
3	Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu (%)	100			
		4 Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	84	84	86,08	102,48
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu (%)	32			
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu (%)	55			
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	30,10	30,10	90,65	302,07
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu	8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	90	55	56	101,82
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Palabuhanratu	9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (%)	7			
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Palabuhanratu	10 Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	80			
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu (%)	80	80	100	125
		12 Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	94			
		13 Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu (Indeks)	84			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			Tahun 2024	TW 1 2024	TW 1 2024	%
		14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu (%)	80			
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu (%)	80			
		16 Nilai IKPA PPN Palabuhanratu (Nilai)	93,76			
		17 Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu (Nilai)	86			
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Indeks)	88,3	88,3	92,16	104,37

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 7 (tujuh) IKU yang diukur capaiannya pada Triwulan I, IKU yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta);
2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton);
3. Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai);
4. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai);
5. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal);
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu (%); dan
7. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Indeks).

SS 1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu

Sasaran kegiatan - 1 “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

IKU 1.1 Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah seluruh penerimaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pungutan PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021 serta Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Adapun Jenis pelayanan jasa yang menghasilkan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meliputi: Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan; Jasa Pas Masuk Kendaraan; Jasa Coldstorage; Jasa Kebersihan; Pengadaan Air; Penggunaan Alat Berat; Jasa Perbengkelan; Jasa Penggunaan Lahan dan Bangunan; Pengadaan Es; Jasa Tempat Penumpukan Barang; Jasa Pemakaian mess; Jasa pemakaian ruang rapat; dan Pelayanan Listrik.

Tabel 5. Capaian IKU “Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu” Triwulan I Tahun 2024

SS 1		Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu							
IKU 1		Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta)							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra PPN Palabuhanratu	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
132,75	1.532,69	1.188,54	297,13	486,13	163,61	40,90	-	1.188,54	40,90
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
-					-	-	-		-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2024
-					-	-	-		-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2024
1.532,69									

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Triwulan Ke I (satu) pada tahun 2024 sebesar Rp. 486.125.075,- melebihi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dicanangkan dalam perjanjian kinerja pelabuhan yaitu sebesar Rp. 297.135.500,- atau 163,60 % sedangkan capai dari target 1 (satu) tahun sebesar 40,90 %. Penerimaan tertinggi selama 1 (satu) Triwulan untuk periode Januari s/d Maret 2024 adalah pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 245.733.426,-

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Triwulan Ke I (satu) tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp. 95.178.563,- atau sebesar 71,70 % dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 pada Triwulan Ke I (satu) berdasarkan hasil rekapitulasi penerimaan bahwa jenis penerimaan tertinggi adalah dari penerimaan Jasa Penggunaan Tanah sebesar Rp. 111.461.640,- atau 22,93 %. sedangkan penerimaan yang terendah adalah jenis penerimaan pas masuk kendaraan Golongan III R6/ Truck sebesar Rp. 550.000,-.

SS 2. Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat

Sasaran kegiatan - 2 “Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu.

IKU 2.2 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator dengan jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan periode pengukuran triwulanan. Produksi perikanan tangkap dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dilaporkan secara berkala setiap bulan maupun harian.

Tabel 7. Capaian IKU “Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu” Triwulan I Tahun 2024

SS 2		Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat							
IKU 2		Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
704,76	7.131	5.800	1.000	3.570,82	357,08	61,57	506,67	5.800	61,57
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
1.730,94									
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2024
4.388									
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2024
7.131									

Perbandingan indikator jumlah volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2023 dengan 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 506,67%. Peningkatan disebabkan oleh beberapa hal yakni jumlah kapal perikanan yang melakukan pembongkaran ikan di PPN Palabuhanratu bertambah. Kapal-kapal perikanan yang datang merupakan kapal-kapal diluar domisili Palabuhanratu yakni dari Pekalongan, Muara Baru, dan Cilacap. Selain itu juga, terdapat kapal-kapal yang melakukan migrasi perijinan dari daerah ke pusat, sehingga kapal (dibawah 30 GT) dengan daerah lain yang memiliki pangkalan pendaratan di PPN Palabuhanratu dapat melakukan pembongkaran ikan di PPN Palabuhanratu. Capaian indikator ini meningkat juga meningkat dikarenakan adanya penambahan SDM Petugas Pendataan Produksi Perikanan dan memberlakukan sistem shift, sehingga pencatatan volume produksi lebih optimal.

SS 3. Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing

Sasaran Kegiatan - 3 “Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu, Tingkat Kinerja PPN

Palabuhanratu, dan Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu.

IKU 3.3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan persentase dari seluruh permohonan perusahaan yang telah dianalisa atau dievaluasi dengan jumlah permohonan perusahaan yang diajukan ditambah dengan 20% dari ruang lingkup pelayanan yang sudah terstandarisasi. IKU ini dilakukan pengukuran secara tahunan.

IKU 3.4 Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu

Indikator kinerja ini merupakan tingkat capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan sesuai keputusan Dirjen Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini dihitung berdasarkan persentase rata – rata capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu melalui aplikasi PIPP. Perhitungan tersebut didasarkan pada tersediannya data dan informasi mengenai kinerja operasional dan terlaksananya kegiatan – kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang meliputi pengumpulan laporan Inspeksi Pembongkaran Ikan, Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kegiatan K5, dan PNBK yang diinput pada aplikasi PIPP.

Tabel 11. Capaian IKU "Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2024

SS 3		Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing							
IKU 4		Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra PPN Palabuhanratu	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
86,25			84	86,08	102,48	102,48	-0,20		102,48
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
87,13			84						

TW 3	88,58	84	TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3	84	% TW 3 2024
88			84						
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2024
88,58			84						

Capaian indikator Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menunjukkan angka 86,08 dengan realisasi 102,48% atau kategori kinerja SANGAT BAIK. Hal ini disebabkan oleh pola pendataan yang terintegrasi dengan entri data yang tepat waktu sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, Tim Evkin dapat bekerja sama dengan baik sesuai tugas dan fungsinya, sehingga dapat menyajikan data tepat waktu. Perbandingan indikator tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada Triwulan I Tahun 2024 dan 2023 menunjukkan penurunan sebesar 0,20%. Hal ini disebabkan oleh adanya kekosongan isi dari komponen kriteria evkin pada bagian kegiatan sosialisasi dikarenakan pada Triwulan I belum ada kegiatan sosialisasi di pelabuhan.

IKU 3.5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru - penyesuaian Triwulan 4 yang menunjukkan total dari Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). IKU baru ini dilakukan pengukuran secara tahunan.

SS 4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal

Sasaran Kegiatan - 4 “Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal” memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu dan Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu.

IKU 4.6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru yang menunjukkan tingkat pengembangan

fasilitas PPN Palabuhanratu dibandingkan dengan masterplan PPN Palabuhanratu. Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan. IKU baru ini dilakukan pengukuran secara tahunan.

IKU 4.7 Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru yang menunjukkan nilai pengendalian lingkungan yang didasarkan pada aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN).

SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan. IKU baru ini dilakukan pengukuran secara triwulanan.

Tabel 17. Capaian IKU " Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2024

SS 4		Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Palabuhanratu yang Optimal							
IKU 7		Nilai Pengendalian Lingkungan PPN Palabuhanratu							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
-			30,10	90,65	302,07	302,07	-		302,07
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024

SS 4		Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Palabuhanratu yang Optimal							
IKU 7		Nilai Pengendalian Lingkungan PPN Palabuhanratu							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	Palabuhanratu	
-	83,18	30,10	30,10	-	-	-	-	30,10	-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2024
-			30,10	-	-	-	-		-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2024
83,18			30,10				-		-

SS 5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan - 5 “Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan.

IKU 5.8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan yang berada di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan pelabuhan binaannya. Perhitungan IKU ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ditambah dengan realisasi Tahun 2023. IKU ini merupakan IKU dengan pengukuran triwulanan.

Tabel 19. Capaian IKU "Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan" Triwulan I Tahun 2024

SS 5		Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu							
IKU 8		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
-			55	56	101,82	62,22	-		62,22
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
-			-	-	-	-	-		-

SS 5		Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu							
IKU 8		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 3	50	90	TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3	90	% TW 3 2024
-			-	-	-	-	-		-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2024
50									-

Dari 55 target Triwulan I, pencapaian indikator ini tercapai sebanyak 56 dokumen SKKP yang terdiri atas kapal daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Capaian ini nyaris sama dengan target yang ditetapkan pada triwulan ini mengalami beberapa kendala dilapangan dimana masih adanya kapal – kapal yang berukuran diatas 6 GT yang dokumen perizinannya sudah tidak berlaku lagi dan sedang dalam proses perpanjangan SIPI, sehingga perlu difasilitasi untuk penerbitannya. Selain itu juga, proses perpanjangan SKKP pada rata-rata berakhir dan mengajukan ulang pada bulan Oktober-November.

SS 6. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di PPN Palabuhanratu

Sasaran kegiatan - 6 “Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan.

IKU 6.9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

Indikator kinerja ini merupakan gabungan dari dua IKU yakni Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan dan Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan.

Indikator ini menunjukkan menunjukkan jumlah peningkatan pengetahuan/ kompetensi atas awak kapal perikanan melalui kegiatan pelatihan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Karena pentingnya seorang nakhoda atau awak kapal perikanan memiliki keahlian dan keterampilan, maka perlu adanya sertifikasi kompetensi sebagai bukti kecakapan nelayan dalam mengoperasikan baik kapal maupun alat penangkapan ikan. Pengukuran Indikator ini yaitu tahunan.

SS 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan - 7 “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu” memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni (1) Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan; (2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu; (3) Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu; (4) IP ASN PPN Palabuhanratu; (5) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu; (6) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu; (7) Nilai IKPA PPN Palabuhanratu; (8) Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu; dan (9) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu.

IKU 7.10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan percepatan pencapaian sasaaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka saat ini capaian pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi salah satu IKU pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Indikator ini dinilai berdasarkan hasil penjumlahan nilai pembangunan ZI menuju WBK pada komponen pengungkit, hasil dan reform yang dihitung secara tahunan. Nilai diperoleh dari hasil penilaian tim internal KKP.

IKU 7.11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan penyelesaian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan II yang dilakukan

berdasarkan audit yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2024. IKU ini merupakan IKU dengan pengukuran triwulanan.

Tabel 25. Capaian IKU " Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu " Triwulan I Tahun 2024

SS 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu							
IKU 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
100	100	80	80	100			-	-	-
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
100									-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2024
100									-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2024
100									-

Pada Triwulan I Tahun 2024, belum ada rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal maupun dari BPK sehingga realisasi yang digunakan adalah hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan terakhir yang telah ditindaklanjuti pada Triwulan I Tahun 2024.

IKU 7.12 Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu

Rekonsiliasi Kinerja merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas kinerja yaitu kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan

melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Indikator ini merupakan indikator baru dengan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun.

IKU 7.13 IP ASN PPN Palabuhanratu

Indikator ini adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Angka capaian indikator kinerja ini diperoleh dan diukur oleh Biro SDMAO Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dihitung tiap semester dari dashboard pengukuran IP ASN KKP pada laman: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/unker/250>.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 diperoleh nilai IP ASN PPN Palabuhanratu di nilai 85,94 dan masih dalam kategori Tinggi. Nilai tersebut disebabkan karena sudah banyak pegawai yang melakukan peningkatan kompetensinya dan rutin menginput hasil peningkatan kompetensinya berupa sertifikat pada e-pegawai.

IKU 7.14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa terdapat beberapa temuan berulang pada unit Eselon I lingkup KKP tiap tahunnya yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa, pengelolaan BMN dan kegiatan prioritas/ strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa, maka dilaksanakan monitoring dalam kepatuhan pengelolaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku (LKE).

IKU ini memiliki periode perhitungan tahunan. Berdasarkan hasil pemantauan progress dari IKU ini diperoleh informasi bahwa sampai dengan Triwulan I 2024 sudah melaksanakan kegiatan penguploadan rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP dan persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE sudah selesai dilaksanakan.

IKU 7.15 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan

pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKU ini memiliki periode perhitungan tahunan. Berdasarkan hasil pemantauan capaian hingga Triwulan I 2024, maka kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pelepasan asset dan penghapusan.

IKU 7.16 Nilai IKPA PPN Palabuhanratu

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan sebagai alat

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada aplikasi Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja. Perhitungan dilakukan tiap Semester. Capaian sementara pada Triwulan I yaitu 93,44.

IKU 7.17 Nilai kinerja anggaran PPN Palabuhanratu

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk membuktikan apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana dan untuk umpan balik perbaikan penganggaran pada periode berikutnya. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian/ Lembaga atas pelaksanaan RKAKL melalui aplikasi SMART DJA. Indikator ini merupakan indikator dengan pengukuran tahunan.

IKU 7.18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan dengan perhitungan setiap triwulanan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP dengan responden sebanyak 140 orang.

Tabel 39. Capaian Indikator "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2024

SS 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu							
IKU 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu							
2023		2024			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2024
-	88,21	88,3	88,3	92,16	104,37	104,37	-	88,3	104,37
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2024
-			-	-	-	-	-		-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2024
-			-	-	-	-	-		-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2024
88,21							-		-

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2024 telah diperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui SP DIPA — 032.03.2.560393/2024 Tanggal 30 November 2023 dengan nilai sebesar Rp.16.221.407.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan;
- b. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- c. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
- d. Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan
- e. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Kelima kegiatan tersebut untuk mendukung sasaran strategis yang sudah ditetapkan dan pencapaian target IKU yang sudah ditetapkan. Secara rinci, anggaran tiap kegiatan yang diperoleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan anggaran yang terealisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 44. Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran pada DIPA PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2024

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000	6.640.000	8,36
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.109.853.000	158.480.223	7,51
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	-	-
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	40.208.000	18.039.000	44,86
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.530.258.000	3.555.649.876	24,47
JUMLAH		16.722.319.000	3.738.809.099	22,36

Dari tabel 46 dapat dijelaskan bahwa total realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2024 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 3.738.809.099,-(tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 22,36% dari pagu sebesar Rp. 16.722.319.000,- (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang terdiri dari beberapa kegiatan yang diimplementasikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada Triwulan I Tahun 2024. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Pelabuhan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dapat dilihat dari Dashboard Aplikasi Kinerjaku. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, sebagaimana tercantum dalam dashboard aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2024 yaitu 112,75%.

Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Seluruh indikator kinerja tersebut tercapai targetnya di Triwulan I Tahun 2024. Adapun rincian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan PNB di PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan telah dilakukannya penertiban dan pencatatan kapal perikanan yang melakukan tambat labuh dan adanya penerimaan umum dari pendapatan hasil penjualan peralatan dan mesin;
- 2) Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan pengoptimalan dalam pencatatan data hasil tangkapan;
- 3) Tingkat kinerja PPN Palabuhanratu. Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari kegiatan – kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang dilakukan penginputan setiap harinya kedalam aplikasi PIPP. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena sudah dibentuk tim khusus PIPP di setiap sub koordinator sehingga masing-masing sub koordinator mempunyai tanggung jawab untuk memasukkan datanya sendiri dan tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang petugas PIPP untuk memasukkan data;

- 4) Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan karena dokumen bukti dukung penilaian pada SELARASKAN dapat terpenuhi.
- 5) Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan. Capaian indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan.
- 6) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil mendapatkan nilai melebihi target yang telah ditetapkan. Pada Triwulan I Tahun 2024, tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal ataupun BPK.
- 7) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Capaian indikator ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan yang sudah cukup baik.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja secara optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, upaya – upaya yang perlu dilakukan di masa mendatang yaitu antara lain:

- a) Mempertahankan pelayanan jasa pelabuhan dan potensi PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu untuk meningkatkan realisasi PNBP sebagaimana yang telah ditargetkan;
- b) Memacu petugas pelayanan jasa untuk lebih optimal dalam pelayanan;
- c) Monitoring secara lebih fokus kedepannya agar capaian indikator kinerja tersebut dapat meningkat bahkan memenuhi target yang telah ditetapkan;
- d) Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah sebagai berikut :
 - Setiap penanggungjawab kegiatan harus konsisten terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
 - Perlu ditingkatkan kepedulian, evaluasi secara sistematis dalam rangka pencapaian indikator kinerja secara berkala.
- e) Mengoptimalkan sarana pelabuhan yang tersedia dan membangun sarana atau fasilitas pelabuhan untuk menunjang operasional, PNBP terutama PNBP Pasca

produksi dan pelayanan pelabuhan kepada masyarakat perikanan;

- f) Mengoptimalkan pengelolaan manajemen mutu bidang-bidang pelayanan pelabuhan, dengan melakukan penerapan ISO 9001:2015 secara terus-menerus guna menjamin mutu pelayanan yang diberikan kepada *stakeholder*;

4.1 TINDAK LANJUT DARI REKOMENDASI SEBELUMNYA

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan IV tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti pada periode triwulan I tahun 2024 yaitu :

1. Menyusun jadwal pelaksanaan input data untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan entry data PIPP;
2. Pembuatan format jadwal pemenuhan dokumen untuk penginputan pada aplikasi SELARASKAN.

4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanatu triwulan I tahun 2024, rekomendasi yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan monev pada pengguna jasa terkait mekanisme sewa lahan dan bangunan;
2. Melakukan sosialisasi prosedur teman SPB dan E-PIT untuk meningkatkan pengetahuan nelayan terkait prosedur dan regulasi baru mengenai PNBK pascaproduksi;
3. Perlu dilakukan pemeriksaan kapal pada pelabuhan binaan ter